



DPDRIAU

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah kabupaten/Kota Untuk Gaji Guru Bantu Daerah Se Provinsi Riau Tahun 2015, perlu dilakukan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.01.24.01.5.2 pada Jenis Belanja Langsung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah kabupaten/Kota Untuk Gaji Guru Bantu Daerah Se Provinsi Riau Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 9 Seri A);

16. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah serta tugas pembantuan.

BAB II PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 2

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 berada pada Jenis Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.01.24.01.5.2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 April 2015
BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19500125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 23

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Keterangan
	Uraian	Jumlah (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.595.404.348.982,00	PENDAPATAN DAERAH	2.597.336.948.982,00	PERUBAHAN
4.1	Pendapatan Asli Daerah	311.112.374.781,00	Pendapatan Asli Daerah	311.112.374.781,00	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	55.667.000.000,00	Hasil Pajak Daerah	55.667.000.000,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.460.088.000,00	Hasil Retribusi Daerah	11.460.088.000,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.526.697.759,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.526.697.759,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.458.589.022,00	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.458.589.022,00	
4.2	Dana Perimbangan	2.073.962.203.000,00	Dana Perimbangan	2.073.962.203.000,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.868.437.899.000,00	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.868.437.899.000,00	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	185.019.984.000,00	Dana Alokasi Umum	185.019.984.000,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	20.504.320.000,00	Dana Alokasi Khusus	20.504.320.000,00	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	210.329.771.201,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	212.262.371.201,00	PERUBAHAN
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	85.339.603.201,00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	85.339.603.201,00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	119.578.768.000,00	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	119.578.768.000,00	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	5.411.400.000,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	7.344.000.000,00	PERUBAHAN
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.411.400.000,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi	7.344.000.000,00	PERUBAHAN
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	5.411.400.000,00	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	7.344.000.000,00	PERUBAHAN
5	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.595.404.348.982,00	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.597.336.948.982,00	PERUBAHAN
5.1	BELANJA DAERAH	3.235.004.348.982,00	BELANJA DAERAH	3.236.936.948.982,00	PERUBAHAN
5.1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.110.296.464.448,00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.110.296.464.448,00	
5.1.1.1	Belanja Pegawai	750.909.042.345,00	Belanja Pegawai	750.909.042.345,00	
5.1.1.3	Belanja Subsidi	9.229.150.682,00	Belanja Subsidi	9.229.150.682,00	
5.1.1.4	Belanja Hibah	112.046.120.000,00	Belanja Hibah	112.046.120.000,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.699.060.000,00	Belanja Bantuan Sosial	10.699.060.000,00	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	1.000.000.000,00	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	1.000.000.000,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan Partai Politik	224.413.091.421,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan Partai Politik	224.413.091.421,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.124.707.884.534,00	BELANJA LANGSUNG	2.126.640.484.534,00	PERUBAHAN
5.2.1	Belanja Pegawai	214.271.230.000,00	Belanja Pegawai	216.203.830.000,00	PERUBAHAN
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	187.284.140.000,00	Honorarium Non PNS	189.216.740.000,00	PERUBAHAN
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honor/tidak tetap	147.791.955.000,00	Honorarium Pegawai Honor/tidak tetap	149.724.555.000,00	PERUBAHAN
5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	39.492.185.000,00	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	39.492.185.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	681.939.869.467,00	Belanja Barang dan Jasa	681.939.869.467,00	
5.2.3	Belanja Modal	1.228.496.785.067,00	Belanja Modal	1.228.496.785.067,00	

Nomor Urut	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Keterangan
	Uraian	Jumlah (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.235.004.348.982,00	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.236.936.948.982,00	
	Surplus / (Defisit)	(639.600.000.000)	Surplus / (Defisit)	(639.600.000.000)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	767.600.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan Daerah	767.600.000.000,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	767.600.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	767.600.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	767.600.000.000,00	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	767.600.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	767.600.000.000,00	Pembiayaan Netto	767.600.000.000,00	
6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	128.000.000.000,00	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	128.000.000.000,00	

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
RINCIAN PERUBAHAN ATAS PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1.20 ~ Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1.20.05 ~ Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Keterangan
				Uraian	Jumlah (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)	
1				2	3	4	5	7
120	1.20.05	00	00	PENDAPATAN DAERAH	2.563.645.061.282,00	PENDAPATAN DAERAH	2.565.577.661.282,00	PERUBAHAN
120	1.20.05	00	00	Pendapatan Asli Daerah	279.353.087.081,00	Pendapatan Asli Daerah	279.353.087.081,00	
120	1.20.05	00	00	Dana Perimbangan	2.073.962.203.000,00	Dana Perimbangan	2.073.962.203.000,00	
120	1.20.05	00	00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	210.329.771.201,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	212.262.371.201,00	PERUBAHAN
120	1.20.05	00	00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	85.339.603.201,00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	85.339.603.201,00	
120	1.20.05	00	00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	85.339.603.201,00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	85.339.603.201,00	
120	1.20.05	00	00	01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.004.371.360,00	01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.004.371.360,00	
120	1.20.05	00	00	03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.919.331.773,00	03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.919.331.773,00	
120	1.20.05	00	00	05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.706.229.641,00	05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.706.229.641,00	
120	1.20.05	00	00	07 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	4.709.670.427,00	07 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	4.709.670.427,00	
120	1.20.05	00	00	08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10.000.000.000,00	08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10.000.000.000,00	
120	1.20.05	00	00	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	119.578.768.000,00	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	119.578.768.000,00	
120	1.20.05	00	00	Dana Penyesuaian	119.578.768.000,00	Dana Penyesuaian	119.578.768.000,00	
120	1.20.05	00	00	02 Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan	98.967.284.000,00	02 Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan	98.967.284.000,00	
120	1.20.05	00	00	04 Dana Insentif Daerah	3.000.000.000,00	04 Dana Insentif Daerah	3.000.000.000,00	
120	1.20.05	00	00	Dana Desa	17.611.484.000,00	Dana Desa	17.611.484.000,00	
120	1.20.05	00	00	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	5.411.400.000,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	7.344.000.000,00	PERUBAHAN
120	1.20.05	00	00	Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.411.400.000,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi	7.344.000.000,00	PERUBAHAN
120	1.20.05	00	00	Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.411.400.000,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi	7.344.000.000,00	PERUBAHAN
120	1.20.05	00	00	BELANJA DAERAH	419.025.029.853,00	BELANJA DAERAH	419.025.029.853,00	
120	1.20.05	00	00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	392.927.444.153,00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	392.927.444.153,00	
120	1.20.05	00	00	BELANJA LANGSUNG	26.097.585.700,00	BELANJA LANGSUNG	26.097.585.700,00	
120	1.20.05	00	00	PEMBIAYAAN DAERAH	767.600.000.000,00	PEMBIAYAAN DAERAH	767.600.000.000,00	
120	1.20.05	00	00	Penerimaan Pembiayaan Daerah	767.600.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan Daerah	767.600.000.000,00	

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
RINCIAN PERUBAHAN ATAS PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1.01 ~ Pendidikan
Organisasi : 1.01.1.01.01 ~ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING			URAIAN SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH (Rp.)	URAIAN SETELAH PERUBAHAN		JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1			2		3	4		5	
			BELANJA LANGSUNG		229.222.100.600,00	BELANJA LANGSUNG		231.154.700.600,00	6
1 01	1.01.01		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		223.849.618.550,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		225.782.218.550,00	
1 01	1.01.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		8.481.246.550,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		8.481.246.550,00	
1 01	1.01.01.01.01	5 2	Penyediaan jasa surat menyurat		32.840.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat		32.840.000,00	
1 01	1.01.01.01.02	5 2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik		966.767.000,00	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik		966.767.000,00	
1 01	1.01.01.01.08	5 2	Penyediaan jasa kebersihan kantor		354.677.600,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor		354.677.600,00	
1 01	1.01.01.01.10	5 2	Penyediaan alat tulis kantor		1.019.235.800,00	Penyediaan alat tulis kantor		1.019.235.800,00	
1 01	1.01.01.01.11	5 2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		412.282.400,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		412.282.400,00	
1 01	1.01.01.01.12	5 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		20.383.750,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		20.383.750,00	
1 01	1.01.01.01.15	5 2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		164.160.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		164.160.000,00	
1 01	1.01.01.01.17	5 2	Penyediaan makanan dan minuman		1.140.690.000,00	Penyediaan makanan dan minuman		1.140.690.000,00	
1 01	1.01.01.01.18	5 2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		758.340.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		758.340.000,00	
1 01	1.01.01.01.19	5 2	Penyediaan jasa keamanan kantor		285.600.000,00	Penyediaan jasa keamanan kantor		285.600.000,00	
1 01	1.01.01.01.20	5 2	Penyediaan jasa administrasi kantor		2.791.200.000,00	Penyediaan jasa administrasi kantor		2.791.200.000,00	
1 01	1.01.01.01.22	5 2	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah		535.070.000,00	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah		535.070.000,00	
1 01	1.01.01.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		7.377.098.000,00	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		7.377.098.000,00	
1 01	1.01.01.02.03	5 2	Pembangunan gedung kantor		2.528.350.000,00	Pembangunan gedung kantor		2.528.350.000,00	
1 01	1.01.01.02.24	5 2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		340.800.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		340.800.000,00	
1 01	1.01.01.02.30	5 2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		82.600.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		82.600.000,00	
1 01	1.01.01.02.47	5 2	Penyusunan DED		450.003.000,00	Penyusunan DED		450.003.000,00	
1 01	1.01.01.02.116	5 2	Pelaksanaan Pengadaan Tanah		3.683.645.000,00	Pelaksanaan Pengadaan Tanah		3.683.645.000,00	
1 01	1.01.01.02.117	5 2	Penyusunan UKL/UPL		291.700.000,00	Penyusunan UKL/UPL		291.700.000,00	
1 01	1.01.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.754.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.754.000,00	
1 01	1.01.01.05.07	5 2	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional		100.754.000,00	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional		100.754.000,00	
1 01	1.01.01.07		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		51.400.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		51.400.000,00	
1 01	1.01.01.07.01	5 2	Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		51.400.000,00	Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		51.400.000,00	
1 01	1.01.01.15		Program Pendidikan Anak Usia Dini		753.707.400,00	Program Pendidikan Anak Usia Dini		753.707.400,00	
1 01	1.01.01.15.58	5 2	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini		228.188.000,00	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini		228.188.000,00	
1 01	1.01.01.15.59	5 2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini		525.519.400,00	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini		525.519.400,00	

KODE REKENING				URAIAN SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH (Rp.)	3	URAIAN SETELAH PERUBAHAN		JUMLAH (Rp.)	4	5	KETERANGAN
1				2								6	6
1 01	1.01.01.16			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		74.981.531.300,00		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		74.981.531.300,00			
1 01	1.01.01.16.59	5 2		Pelatihan Penyusunan kurikulum		837.658.000,00		Pelatihan Penyusunan kurikulum		837.658.000,00			
1 01	1.01.01.16.67	5 2		Penyelenggaraan Paket A Setara SD		75.966.000,00		Penyelenggaraan Paket A Setara SD		75.966.000,00			
1 01	1.01.01.16.68	5 2		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP		177.116.000,00		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP		177.116.000,00			
1 01	1.01.01.16.79	5 2		Pengadaan Mebelur Sekolah Dasar (SD Sederajat)		6.898.624.000,00		Pengadaan Mebelur Sekolah Dasar (SD Sederajat)		6.898.624.000,00			
1 01	1.01.01.16.80	5 2		Pengadaan Mebelur Sekoah Menegah Pertama (SMP Sederajat)		2.329.020.000,00		Pengadaan Mebelur Sekoah Menegah Pertama (SMP Sederajat)		2.329.020.000,00			
1 01	1.01.01.16.81	5 2		Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat)		11.961.657.600,00		Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat)		11.961.657.600,00			
1 01	1.01.01.16.82	5 2		Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)		5.803.014.500,00		Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)		5.803.014.500,00			
1 01	1.01.01.16.84	5 2		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLSN) Tingkat SMP/MTs		325.942.500,00		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLSN) Tingkat SMP/MTs		325.942.500,00			
1 01	1.01.01.16.85	5 2		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat)		26.714.021.100,00		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat)		26.714.021.100,00			
1 01	1.01.01.16.86	5 2		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)		19.858.511.600,00		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)		19.858.511.600,00			
1 01	1.01.01.17			Program Pendidikan Menengah		45.390.782.100,00		Program Pendidikan Menengah		45.390.782.100,00			
1 01	1.01.01.17.15	5 2		Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		431.481.000,00		Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		431.481.000,00			
1 01	1.01.01.17.18	5 2		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		2.015.631.000,00		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		2.015.631.000,00			
1 01	1.01.01.17.58	5 2		Pelatihan penyusunan kurikulum		1.007.486.000,00		Pelatihan penyusunan kurikulum		1.007.486.000,00			
1 01	1.01.01.17.63	5 2		Penyelenggaraan Paket C setara SMU		400.066.000,00		Penyelenggaraan Paket C setara SMU		400.066.000,00			
1 01	1.01.01.17.68	5 2		Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah		443.256.000,00		Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah		443.256.000,00			
1 01	1.01.01.17.72	5 2		Pengadaan Mebelur Sekolah Menengah (SMA Sederajat)		4.576.660.000,00		Pengadaan Mebelur Sekolah Menengah (SMA Sederajat)		4.576.660.000,00			
1 01	1.01.01.17.73	5 2		Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (SMA Sederajat)		14.413.896.600,00		Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (SMA Sederajat)		14.413.896.600,00			
1 01	1.01.01.17.74	5 2		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLSN) Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat		459.542.500,00		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLSN) Tingkat Sekolah Menengah Atas Sederajat		459.542.500,00			
1 01	1.01.01.17.75	5 2		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA Sederajat)		11.898.054.000,00		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA Sederajat)		11.898.054.000,00			
1 01	1.01.01.17.76	5 2		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		9.461.099.000,00		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		9.461.099.000,00			
1 01	1.01.01.17.77	5 2		Pengadaan Meubiler Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		283.610.000,00		Pengadaan Meubiler Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		283.610.000,00			
1 01	1.01.01.20			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		4.299.399.500,00		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		4.299.399.500,00			
1 01	1.01.01.20.01	5 2		Pelaksanaan sertifikasi pendidik		55.356.000,00		Pelaksanaan sertifikasi pendidik		55.356.000,00			
1 01	1.01.01.20.04	5 2		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)		145.558.000,00		Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)		145.558.000,00			
1 01	1.01.01.20.14	5 2		Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah		688.059.000,00		Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah		688.059.000,00			
1 01	1.01.01.20.18	5 2		Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bagi Guru SMP/MTs		345.904.000,00		Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bagi Guru SMP/MTs		345.904.000,00			
1 01	1.01.01.20.19	5 2		Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bagi Guru SMA/ MA/SMK		412.648.000,00		Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bagi Guru SMA/ MA/SMK		412.648.000,00			
1 01	1.01.01.20.20	5 2		Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan Bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		185.568.000,00		Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan Bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		185.568.000,00			
1 01	1.01.01.20.21	5 2		Pembinaan OSN guru SD/MI, SLTP dan SLTA		557.603.000,00		Pembinaan OSN guru SD/MI, SLTP dan SLTA		557.603.000,00			
1 01	1.01.01.20.23	5 2		Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Melalui Pelatihan Tingkat Dasar (Biaya Pendidik Kelas)(Sharing Propinsi)		559.536.000,00		Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Melalui Pelatihan Tingkat Dasar (Biaya Pendidik Kelas)(Sharing Propinsi)		559.536.000,00			
1 01	1.01.01.20.31	5 2		Mahir Lanjutan Kepramukaan bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan		424.936.000,00		Mahir Lanjutan Kepramukaan bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan		424.936.000,00			

KODE REKENING			URAIAN SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH (Rp.)	3	URAIAN SETELAH PERUBAHAN		JUMLAH (Rp.)	4	5	KETERANGAN
1			2								6	*
1 01	1.01.01.20.32	5 2	Pertemuan pembina pramuka siaga, penggalang dan penegak (karang pamitran)		218.075.000,00		Pertemuan pembina pramuka siaga, penggalang dan penegak (karang pamitran)		218.075.000,00			
1 01	1.01.01.20.33	5 2	Lomba kompetensi siswa (LKS) dan OSN siswa SMA		706.156.500,00		Lomba kompetensi siswa (LKS) dan OSN siswa SMA		706.156.500,00			
1 01	1.01.01.22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		7.425.499.700,00		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		7.425.499.700,00			
1 01	1.01.01.22.02	5 2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan		1.260.630.000,00		Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan		1.260.630.000,00			
1 01	1.01.01.22.09	5 2	Monitoring: evaluasi dan pelaporan		62.810.000,00		Monitoring: evaluasi dan pelaporan		62.810.000,00			
1 01	1.01.01.22.11	5 2	Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas VI SD Khusus Mata Pelajaran UASBN		750.106.500,00		Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas VI SD Khusus Mata Pelajaran UASBN		750.106.500,00			
1 01	1.01.01.22.12	5 2	Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas III SMP/MTs Khusus Mata Pelajaran UNAS		1.178.560.500,00		Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas III SMP/MTs Khusus Mata Pelajaran UNAS		1.178.560.500,00			
1 01	1.01.01.22.13	5 2	Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SD/MI, dan Pemantauan UASBN SD/MI		529.657.100,00		Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SD/MI, dan Pemantauan UASBN SD/MI		529.657.100,00			
1 01	1.01.01.22.14	5 2	Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SMP/MTs, dan Pemantauan UN/US SMP/MTs		466.388.000,00		Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SMP/MTs, dan Pemantauan UN/US SMP/MTs		466.388.000,00			
1 01	1.01.01.22.15	5 2	Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas III SMA/MA Khusus Mata Pelajaran Unas		1.317.496.200,00		Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas III SMA/MA Khusus Mata Pelajaran Unas		1.317.496.200,00			
1 01	1.01.01.22.16	5 2	Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SMA/MA/SMK, dan Pemantauan UN/US SMA/MA/SMK		474.290.900,00		Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SMA/MA/SMK, dan Pemantauan UN/US SMA/MA/SMK		474.290.900,00			
1 01	1.01.01.22.17	5 2	Liga Pendidikan Indonesia (LPI)		401.674.000,00		Liga Pendidikan Indonesia (LPI)		401.674.000,00			
1 01	1.01.01.22.19	5 2	Pembangunan Sarana Prasarana Pramuka		983.886.500,00		Pembangunan Sarana Prasarana Pramuka		983.886.500,00			
1 01	1.01.01.23		Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi		19.979.200.000,00		Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi		19.979.200.000,00			
1 01	1.01.01.23.01	5 2	Dukungan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi asal Kab. Siak		8.650.000.000,00		Dukungan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi asal Kab. Siak		8.650.000.000,00			
1 01	1.01.01.23.02	5 2	Pembangunan Perguruan Tinggi (PT)		11.329.200.000,00		Pembangunan Perguruan Tinggi (PT)		11.329.200.000,00			
1 01	1.01.01.24		Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan		55.009.000.000,00		Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan		56.941.600.000,00			
1 01	1.01.01.24.01	5 2	Dukungan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan		55.009.000.000,00		Dukungan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan		56.941.600.000,00			PERUBAHAN
1 01	1.01.01.24.01	5 2	BELANJA LANGSUNG		55.009.000.000,00		BELANJA LANGSUNG		56.941.600.000,00			PERUBAHAN
1 01	1.01.01.24.01	5 2 1	Belanja Pegawai		55.009.000.000,00		Belanja Pegawai		56.941.600.000,00			PERUBAHAN
1 01	1.01.01.24.01	5 2 1 01	Honorarium PNS		28.000.000,00		Honorarium PNS		28.000.000,00			
1 01	1.01.01.24.01	5 2 1 01	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		12.000.000,00		Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		12.000.000,00			
			PPTK (1 Orang x 10 bulan)		12.000.000,00		PPTK (1 Orang x 10 bulan)		12.000.000,00			
1 01	1.01.01.24.01	5 2 1 01	Honorarium Staf PPTK		16.000.000,00		Honorarium Staf PPTK		16.000.000,00			
			Staf PPTK (2 Orang x 10 bulan)		16.000.000,00		Staf PPTK (2 Orang x 10 bulan)		16.000.000,00			
1 01	1.01.01.24.01	5 2 1 02	Honorarium Non PNS		54.981.000.000,00		Honorarium Non PNS		56.913.600.000,00			PERUBAHAN
1 01	1.01.01.24.01	5 2 1 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap		54.981.000.000,00		Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap		56.913.600.000,00			PERUBAHAN
			Staf PPTK (3 Orang x 10 Bulan)		24.000.000,00		Staf PPTK (3 Orang x 10 Bulan)		24.000.000,00			
			Honor Guru Pada Sekolah Negeri (1050 Orang x 12 Bulan)		22.680.000.000,00		Honor Guru Pada Sekolah Negeri (1050 Orang x 12 Bulan)		22.680.000.000,00			
			Honor Non Guru Pada Sekolah Negeri (504 Orang x 12 Bulan)		8.467.200.000,00		Honor Non Guru Pada Sekolah Negeri (504 Orang x 12 Bulan)		8.467.200.000,00			
			Honor Guru Bantu Propinsi (306 Orang x 12 Bulan)		2.203.200.000,00		Honor Guru Bantu Propinsi (306 Orang x 12 Bulan)		2.203.200.000,00			
			Honor Guru Mata Pelajaran SD Binaan S-1 (10 Orang x 12 Bulan)		216.000.000,00		Honor Guru Mata Pelajaran SD Binaan S-1 (10 Orang x 12 Bulan)		216.000.000,00			
			Honor Guru Komputer (18 Orang x 12 Bulan)		388.800.000,00		Honor Guru Komputer (18 Orang x 12 Bulan)		388.800.000,00			
			Honor Guru dan Non Guru TK/RA Swasta (737 Orang x 12 Bulan)		6.190.800.000,00		Honor Guru dan Non Guru TK/RA Swasta (737 Orang x 12 Bulan)		6.190.800.000,00			
			Honor Guru Agama Tidak Tetap (8 Orang x 12 Bulan)		172.800.000,00		Honor Guru Agama Tidak Tetap (8 Orang x 12 Bulan)		172.800.000,00			
			Honor Guru Kontrak Mata Pelajaran (12 Orang x 12 Bulan)		360.000.000,00		Honor Guru Kontrak Mata Pelajaran (12 Orang x 12 Bulan)		360.000.000,00			

